



HULONDALO

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI

Available online <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

Analisis *Framing* Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter “*Dirty Vote*”

Framing Analysis of the 2024 Election in the Documentary Film “Dirty Vote”

Elinawati Aisyah^{1*}, Catur Suratnoaji²

¹²Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
elinawati785@gmail.com*, catur_suratnoaji.ilkom@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *framing* pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan model Pan dan Kosicki. Model ini mencakup empat struktur, sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil menunjukkan bahwa *Dirty Vote* membingkai kecurangan pemilu sebagai ancaman besar bagi demokrasi, dengan menggambarkan manipulasi oleh elite politik sebagai strategi terstruktur. Struktur sintaksis menyoroti peran elite politik, skrip menampilkan manipulasi melalui penunjukan pejabat tidak netral dan politisasi bantuan sosial, tematik memperlihatkan ancaman terhadap keadilan, dan retorik membingkai elite politik sebagai oportunist. Secara keseluruhan, *Dirty Vote* menekankan kecurangan pemilu sebagai ancaman serius bagi demokrasi, sekaligus mengajak peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu agar bersih dan transparan.

Kata kunci: Analisis *Framing*; Pemilihan Umum; Film Dokumenter; *Dirty Vote*

Abstract

This study analyzes media framing of the 2024 election fraud issue in Indonesia through the documentary film *Dirty Vote*. The method used is framing analysis with a descriptive qualitative approach. Data analysis in this study applies the model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which includes four structures: syntax, script, thematic, and rhetoric. Results indicate that *Dirty Vote* frames election fraud as a significant threat to democracy, portraying manipulation by political elites as a structured strategy. The syntactic structure highlights the role of political elites, the script presents manipulation through the appointment of non-neutral officials and the politicization of social aid, the thematic structure shows threats to justice, and the rhetoric frames political elites as opportunists. Overall, *Dirty Vote* emphasizes election fraud as a serious threat to democracy, while encouraging active public involvement in monitoring elections to ensure they remain clean and transparent.

Keywords: Framing Analysis; General Election; Documentary Film, *Dirty Vote*

I. PENDAHULUAN

Pemungutan dan perhitungan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah terlaksana pada 14—15 Februari 2024 secara serentak. Suasana politik di Indonesia memanas saat menjelang pemilu 2024 lalu. Kehadiran film dokumenter “*Dirty Vote*” telah menciptakan gelombang baru dalam diskusi publik mengenai integritas pemilihan umum tahun 2024. Film dokumenter “*Dirty Vote*” dirilis empat hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Hal itu membuat banyaknya perbincangan dan menuai pro-kontra publik pada film dokumenter tersebut dikarenakan tayang pada saat masa tenang.

Film dokumenter “*Dirty Vote*” mengungkap sebuah kecurangan pemilihan umum dari sudut pandang para pakar hukum tata negara Indonesia. Banyaknya kecurangan yang terjadi secara terbuka dan tidak pernah ditindaklanjuti diperlihatkan dalam film ini. *Dirty Vote* menggambarkan bagaimana para politisi memanipulasi masyarakat demi kepentingan pribadi. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara dan tampil dalam film dokumenter, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Jentera Bivitri Susanti yang berperan sebagai aktor sekaligus presenter. Film dokumenter *Dirty Vote* dirilis pada 11 Februari 2024, berdurasi 1 jam 57 menit dan telah ditonton lebih dari 9,8 juta kali dan mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat (BBC Indonesia, 2024).



Gambar 1. Thumbnail Film Dokumenter *Dirty Vote*.

Berdasarkan isi film “*Dirty Vote*”, film ini menggambarkan betapa kotor proses berjalannya pemilu 2024 yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa film tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi sebagai sarana penerangan dan pendidikan (Effendy, 2003). Dengan demikian, film mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pendapat dan perspektif masyarakat terhadap suatu isu. Meski kontroversial, *Dirty Vote* ini

menjadi bahan perdebatan di media sosial dan dinilai sebagai upaya kampanye tersembunyi untuk meningkatkan golput pada pemilihan umum 2024 serta menjatuhkan pasangan calon tertentu (Yulianti, 2024).

Dalam penelitian ini, *framing* digunakan untuk memahami pesan mengenai isu kecurangan dalam Pemilu 2024. Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan semiotika. Metode ini tidak hanya diterapkan pada media massa, tetapi juga dapat digunakan pada media internal organisasi, buku, film, atau situs web (Ayomi, 2021). Secara sederhana, analisis *framing* bertujuan untuk memahami bagaimana suatu peristiwa, aktor, kelompok, atau individu dibingkai oleh media. Proses *framing* ini mencakup konstruksi realitas sosial, yang hasilnya bisa terlihat dalam pemberitaan media atau wawancara dengan individu tertentu. Keseluruhan elemen ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis jurnalistik, tetapi juga mencerminkan cara peristiwa tersebut dipahami dan disajikan kepada publik (Ayomi, 2021).

Ada beberapa model analisis framing yang disebutkan dalam buku Eriyanto, seperti model William A. Gamson dan Andre Modigliani, Murray Edelman F., Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dan Robert N. Entman. Setiap model memiliki cara analisis masing-masing. Dalam Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki berasumsi bahwa wacana media adalah proses kesadaran sosial yang melibatkan tiga pihak yakni sumber, jurnalis, dan *audiens*.

Model ini mengidentifikasi empat struktur utama dalam framing media, yakni struktur sintaksis yang memeriksa cara media mengatur informasi dalam teks, seperti urutan peristiwa, penggunaan kata-kata tertentu, atau posisi suatu informasi dalam teks. Kedua, struktur skrip yang menyoroti pola atau alur yang mengacu pada elemen 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*) yang memberikan gambaran lengkap tentang kejadian atau isu yang dibahas. Ketiga, struktur tematik yang mengidentifikasi tema atau topik utama dalam teks, biasanya melalui perangkat koherensi. Keempat, struktur retorik yang mengamati pemilihan kata, idiom, metafora dan gambar (Eriyanto, 2015). Dengan menggunakan keempat struktur ini, model Pan dan Kosicki memungkinkan analisis menyeluruh terhadap bagaimana media membingkai informasi, sehingga memengaruhi persepsi dan pemahaman audiens terhadap suatu isu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai film dokumenter "*Dirty Vote*" terkait bagaimana *framing* yang dilakukan terhadap pemilihan umum tahun 2024 melalui model analisis Pan dan Kosicki. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menuangkannya dalam judul "*Analisis Framing Pemilihan Umum 2024 dalam Film Dokumenter Dirty Vote.*"

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* dan hal ini menjadi bagian dalam metode kualitatif. Penelitian Sugiyono menyatakan bahwa tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan, menjelaskan,

menerangkan, dan memberikan jawaban secara lebih terperinci terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Nugrahani (2014), penelitian deskriptif kualitatif mengambil kumpulan data dari kalimat, gambar hingga kata yang memiliki tujuan sehingga dapat dideskripsikan dengan detail.

Penggunaan penelitian analisis *framing* dalam penelitian kualitatif ini akan penulis gunakan untuk melihat pembingkai pemilihan umum 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Teknik penyajian data menggunakan dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan analisis data akan mencakup skrip (penulisan) dari narasi audio visual yang prosesnya akan melibatkan pernyataan oleh narrator, catatan mengenai adegan, teks maupun makna gambar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Film "*Dirty Vote*" menceritakan adanya penyimpangan dan manipulasi dalam pemilu di Indonesia. Film ini membahas bagaimana pemilu dimanfaatkan oleh elite politik untuk keuntungan pribadi, dengan berbagai praktik kotor sehingga bisa membahayakan demokrasi. Film yang berdurasi 1 jam 58 menit ini memperlihatkan beberapa data dan tayangan kecurangan yang dilakukan aktor politik semenjak proses pemilu hingga beberapa hari dilaksanakannya pemilu 2024.

Melalui analisis data, penelitian ini mengkaji bagaimana film *Dirty Vote* melakukan pembingkai terhadap kecurangan pemilu 2024 berdasarkan model Zhodang Pan dan M. Kosicki. Analisis data dilihat dari empat struktur yakni, struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik yang dinilai berdasarkan elemen teks dan visual.

a. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis bertujuan untuk menganalisis cara media membingkai informasi dengan menggunakan elemen-elemen dalam berita, seperti judul, thumbnail, lead, latar, kutipan narasumber, pernyataan, dan penutup.

Film ini berjudul *Dirty Vote*, dengan gambar papan catur yang bertuliskan "Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024" sebagai thumbnail. Berdasarkan judul, film ini ingin menginformasikan adanya suara yang kotor dalam pemilu 2024. Kalimat yang ada pada thumbnail memperjelas gagasan dari judul tersebut. Judul dan thumbnail pada film ini dapat disimpulkan bahwa adanya kecurangan dan manipulasi dalam proses pemilu 2024 dan menghasilkan suara yang kotor. Berangkat dari permasalahan tersebut ketiga pakar hukum tata negara menyiapkan dan mengumpulkan data mengenai kecurangan yang dilakukan pemerintahan saat menjelang pemilu.

Film ini dibuka dengan lead yang disampaikan oleh salah satu pakar hukum.

“Jika anda nonton film ini saya punya pesan sederhana, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman.” (Menit 00.10)

Pesan pada lead memperkuat kesan bahwa pemilu di Indonesia dipenuhi dengan tindakan tidak adil, mengajak penonton untuk merenungkan dan mengambil sikap kritis terhadap hal tersebut. Film ini dimulai dengan latar belakang informasi yang kuat, memperlihatkan Jakarta sebagai titik awal dengan pengambilan gambar di berbagai tempat, termasuk rumah produksi film. Pengambilan film dokumenter ini memperlihatkan beberapa kameramen yang bertugas dan ada satu layar untuk menampilkan berita serta data yang telah di riset.

“....peristiwa ketidaknetralan pejabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu, saya mau ambil contoh kasus pj gubernur di Kalimantan Barat.” (Menit 21.18)

Jika dilihat kutipan tersebut, dibuktikan bahwa latar investigasi film ini menyusun berita di berbagai daerah, dari Jakarta sebagai pusat kekuasaan, hingga daerah-daerah seperti Kalimantan Barat, Sulawesi, dan NTB yang menjadi sasaran bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa film *Dirty Vote* berisi adanya kecurangan politik yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, tidak terbatas hanya di wilayah tertentu.

Beberapa kutipan sumber berita serta data yang di tampilkan dari film ini memberi pemahaman bahwa ancaman utama terhadap demokrasi di Indonesia adalah meningkatnya kecurangan politik dan manipulasi dalam pemilu 2024. Narasumber dalam film ini menyoroti berbagai aspek yang memperlihatkan bagaimana proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

Narasumber pertama adalah Zainal Arifin Mochtar seorang pakar hukum tata negara, yang memberikan pandangan kritis terhadap pertarungan politik yang sering kali melahirkan dikotomi antara kekuatan pro status quo dan pro perubahan. Zainal juga menyebutkan fenomena Gerakan Empat Jari sebagai simbol penggabungan kekuatan antara kubu-kubu 01 dan 03.

“Pertarungan pemilu itu sering melahirkan dikotomi, antara pro status quo dan pro perubahan.” (Menit 06.42)

Zainal juga menjelaskan mengenai narasi pemilu satu putaran yang diusung oleh tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua. Ia berpendapat, jika Pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran, Prabowo-Gibran berpotensi mengalami kekalahan, meskipun saat ini mereka memimpin dalam berbagai survei wilayah.

Hal ini dibahas oleh narasumber kedua yakni Feri Amsari, membenarkan hal mengenai satu putaran yang ketentuannya ada dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (3), syarat satu putaran bagi seorang calon presiden bisa terpilih adalah jika calon presiden berhasil memenangkan lebih dari 50% suara nasional serta mendominasi sebaran di setidaknya 20 provinsi, maka pemilu 2024 dapat diselesaikan dalam satu putaran. Hal ini akan memastikan kemenangan tanpa

perlu dilakukan pemilihan ulang atau putaran kedua. Maka, sebaran wilayah sangat penting dibandingkan hasil suara untuk satu putaran.

Berdasarkan sebaran wilayah, Feri juga membahas bahwa pasangan Prabowo - Gibran unggul dipulau Papua yang sebelumnya hanya memiliki 2 provinsi dan sekarang menjadi 6 provinsi. Provinsi baru di Papua bisa langsung ikut pemilu 2024, berbeda dengan Kalimantan Utara pada pemilu 2014 yang bisa ikut pemilu di 2019.

“...berbeda dengan Kaltara, yang didirikan pada 2013 dan harus menunggu enam tahun untuk ikut Pemilu 2019. Perkembangan di Pulau Papua sangat krusial dalam membahas sebaran wilayah.” (Menit 12.40)

Selain sebaran wilayah, penguasa di wilayah tersebut juga dibebankan oleh Feri Amsari. Dilihat dari penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Jokowi, hal ini dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada pertahanan. Penunjukan pejabat kepala daerah sering kali tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan proses tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. Feri menjelaskan bahwa restu Presiden dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam penunjukan ini menyebabkan maladministrasi yang diakui oleh Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia.

“...Penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan, mendengarkan aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah.”

Feri juga mengungkapkan adanya relasi kuat antara penunjukan pejabat daerah dan ketidaknetralan mereka dalam pemilu, seperti yang terlihat dalam kasus PJ Gubernur Bali, yang mencabut baliho dan spanduk kampanye Ganjar Pranowo, serta PJ Bupati Muna Barat, yang secara terang-terangan mendukung relawan Ganjar.

“..berbagai peristiwa ketidaknetralan pejabat ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh pejabat gubernur dalam pemilu.”

Kecurangan dalam proses pemilu ini juga dibahas oleh narasumber kedua yakni Zainal. Ia menyoroti kasus Deklarasi Desa Bersatu yang melibatkan ribuan kepala desa di GBK dan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Meskipun acara tersebut dikembalikan menjadi silaturahmi nasional, indikasi keberpihakan masih terlihat. Zainal menegaskan bahwa kepala desa sering menjadi objek politisasi karena besarnya kekuasaan mereka dalam mengelola data pemilih, dana desa, dan bantuan sosial.

“..Kepala desa memiliki kekuasaan besar yang potensial disalahgunakan, mulai dari data pemilih hingga alokasi bansos.”

Membahas mengenai kecurangan pada Bantuan Sosial (bansos) di tambahkan oleh narasumber ketiga yakni Bivitri Susanti. Bansos meningkat drastis pada masa pemilu dan dipergunakan secara strategis untuk kepentingan politik. Ditunjukkan bahwa bansos sering kali melonjak tajam

menjelang pemilu, seperti yang terlihat pada 2019 dan 2024. Bivitri menyoroti bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar 508 triliun rupiah pada 2024, yang sebagian besar digunakan untuk bantuan sembako dan bantuan langsung tunai.

“Kita bisa melihat bagaimana bansos ini meroket menjelang pemilu, bahkan lebih besar dari masa pandemi COVID-19.”

Bivitri juga menyentuh konsep politics of pork barrel, yang menggambarkan bagaimana uang negara digelontorkan untuk memenangkan dukungan politik. Bivitri menjelaskan bahwa bansos, seharusnya bersifat netral dan berfungsi untuk memenuhi amanah keadilan sosial Pancasila. Tetapi dalam konteks politik, bansos sering digunakan sebagai alat untuk memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan tertentu.

“Bansos harus dilakukan dengan cepat, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alat politik.”

Dalam konteks ini, Bivitri juga menyoroti penggunaan fasilitas negara oleh menteri-menteri yang ikut berkampanye. Dia mengkritik bahwa banyak menteri tidak mematuhi aturan untuk cuti ketika mereka berkampanye, dan bahkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

“Menteri tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tetapi kenyataannya fasilitas seperti pesawat TNI digunakan untuk kampanye.”

Pada bagian lain, Feri Amsari membahas masalah ketidakmampuan Bawaslu dalam menegakkan hukum terkait kecurangan pemilu. Ia menyebutkan bahwa Bawaslu sering kali hanya memberikan teguran ringan, meskipun ada pelanggaran serius seperti kampanye terselubung. Feri memberikan contoh kasus Bawaslu yang tidak berani menangani kampanye melalui akun media sosial Kementerian Pertahanan.

“Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal seharusnya ada sanksi yang menjerakan.”

Feri juga mempertanyakan integritas Bawaslu, menyebutkan bahwa beberapa anggotanya memiliki hubungan erat dengan tim sukses Jokowi, yang menimbulkan kecurigaan akan ketidaknetralan dalam pengawasan pemilu. Dia memberikan contoh Juri Ardiantoro, Ketua Pansel Bawaslu, yang pernah menjadi anggota Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2019 dan juga terlibat dalam tim kampanye 2024.

“Integritas Bawaslu dipertanyakan, terutama terkait dengan proses seleksi yang dianggap sudah ditentukan jauh hari.”

Fakta yang ada berdasarkan informasi, cuplikan berita serta bukti-bukti yang disampaikan oleh ketiga narasumber atau pakar hukum tata negara dalam film ini memberikan pandangan bahwa hal tersebut ancaman bagi Indonesia dikarenakan banyaknya kecurangan dan ketidaknetralan para elite politik selama proses pemilu 2024. Dirty Vote memberikan pesan kuat bahwa

manipulasi politik telah meluas di berbagai daerah dan tindakan ini telah mengubah arah demokrasi di Indonesia sendiri.

Berdasarkan struktur sintaksis dalam film *Dirty Vote*, penulis menyimpulkan dari judul, thumbnail, lead, latar, kutipan sumber dan pernyataan bahwa pemilu 2024 di Indonesia dibingkai untuk memperlihatkan adanya kecurangan dan ketidaknetralan yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara dan ketidakmampuan lembaga pengawas seperti Bawaslu. Melalui pernyataan narasumber, media menginformasikan bahwa sejumlah menteri dan pejabat terlibat melakukan kampanye secara terbuka tanpa mengikuti prosedur.

b. Struktur Skrip

Analisis melalui struktur skrip dapat diuraikan berdasarkan unsur 5W + 1H. *What* (masalah apa) yang diangkat adalah adanya manipulasi dan penyimpangan dalam proses pemilu 2024. *Who* (siapa narasumber) yang menjadi fokus dalam film ini adalah tiga pakar hukum negara, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. *When* (kapan) film ini mengambil data dari peristiwa yang terjadi sejak 2014 dan melakukan analisis dalam waktu dua minggu. Film ini dirilis pada 11 Februari 2024, yang bertepatan dengan empat hari sebelum dilaksanakannya pemilu. *Where* (di mana lokasi) yang disorot dalam film meliputi berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatera, Papua, dan Jawa yang memberikan gambaran tentang bagaimana manipulasi pemilu ini berlangsung di berbagai lokasi strategis di Indonesia.

Why (mengapa pemilu dimanipulasi) dijelaskan dalam film sebagai upaya elite politik dan aktor-aktor tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi sistem pemilu dan memperkuat pengaruh di wilayah yang strategis, yang berpotensi mengancam demokrasi dan keberagaman suara masyarakat.

How (bagaimana) dalam film diuraikan bahwa manipulasi ini terjadi melalui serangkaian tindakan, termasuk penunjukan pejabat daerah yang tidak netral, politisasi bantuan sosial, pelanggaran terhadap keputusan hukum, serta penyebaran kekuasaan melalui pemekaran wilayah. Film ini juga menampilkan beberapa cuplikan berita, wawancara, surat tertulis, dan rekaman suara yang menunjukkan indikasi kecurangan dalam pemilu, menyoroti betapa sistematisnya upaya-upaya tersebut.

Berdasarkan struktur skrip media menggambarkan bahwa bansos dan fasilitas negara digunakan secara strategis demi kepentingan politik, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Narasumber lain juga memberikan pandangan bahwa ketidaknetralan pejabat kepala daerah dan penggunaan bansos sebagai alat politik telah menjadi masalah sistemis dalam pemilu 2024. Film ini juga menyoroti integritas lembaga pengawas, khususnya Bawaslu dan KPU yang diragukan integritasnya karena berkaitan dengan lingkaran politik presiden.

Di akhir film, narasumber memberikan pernyataan yang mengkritik praktik politik kotor dan sistematis yang telah berlangsung, menyatakan bahwa skenario semacam ini hanya akan melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat. Ditekankan juga bahwa penting bagi masyarakat untuk lebih sadar akan manipulasi politik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para pemimpin.

c. Struktur Tematik

Analisis struktur tematik teks dapat dilakukan melalui elemen-elemen seperti paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Pada analisis ini, perangkat framing yang diterapkan mencakup koherensi, penggunaan kata ganti, serta struktur kalimat. Jenis-jenis koherensi yang ditemukan dalam film meliputi kausalitas, kontras, kontemporal, perurutan, dan intensitas.

Koherensi kausalitas terdapat pada pernyataan :

“...Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut Pemilu 2019. Cukup panjang bagi Kaltara untuk bisa ikut pemilu. Itu sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah.”
(Menit 12.40 – 13.00)

Berdasarkan kalimat tersebut, terlihat adanya perbedaan perlakuan dalam proses partisipasi pemilu antara Kaltara dan Papua. Hal ini menyebabkan sebaran wilayah di Papua menjadi sorotan, mengindikasikan bahwa dinamika politik di wilayah tersebut mungkin terkait erat dengan keputusan strategis di tingkat pusat.

Pada kasus lain juga membahas mengenai Pak Tito Karnavian yang melakukan penunjukan pejabat dan dilakukan secara tertutup, hal ini menyebabkan adanya pelanggaran putusan MK dan telah di nyatakan sebagai maladministrasi.

“...Proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, komisi informasi pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan pejabat itu telah melakukan maladministrasi.” (Menit 18.04 – 19.00)

Selain adanya pelanggaran pada putusan MK, terdapat pula isu kampanye terselubung yang dilakukan selama proses pemilu.

“...Apakah ia sedang melaksanakan kampanye yang nampak seperti itu? Kalaupun iya ikut serta, apakah ia cuti atau tidak? Tidak ada informasi. Begitu terangnya dukungan ini diberikan sehingga kita bisa menduga ada kampanye terselubung yang tengah terjadi.” (Menit 51.06 - 52.00)

Pernyataan ini muncul dikarenakan beberapa Menteri yang memberikan dukungan secara terang-terangan di media sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat bisa menduga adanya kampanye terselubung, terlebih tidak adanya informasi apakah Menteri tersebut sedang cuti atau tidak.

Koherensi kontras ada dalam beberapa pernyataan:

“Tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu, dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi, faktanya Bawaslu inkompeten.”

“...Partai Gelora tidak memenuhi syarat soal seribu orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya, hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi punya Kartu Tanda Anggota. Namun luar biasanya partai ini tetap dinyatakan lolos.”

“...tetapi yang menarik Putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran langsung dijalankan dengan cepat. Pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai Calon Wakil Presiden.”

Dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan tersebut bahwa media menggambarkan adanya kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. KPU dan Bawaslu yang paling disorot karena melakukan beberapa putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Koherensi Kontemporal bisa dilihat dalam pernyataan:

“Jika kita simak hasil pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah satu kali pun dalam kontestasinya.” (Menit 12.33 – 13.00)

“...provinsi baru Kaltara yang didirikan tahun 2013 tapi mereka tidak bisa ikut serta merta pada pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut Pemilu 2019. Sedangkan Papua sudah bisa ikut pemilu 2024 tanpa menunggu periode selanjutnya.” (Menit 37.26 - 39.00)

Berdasarkan dapat diketahui bahwa Jokowi konsisten unggul di Papua dalam pemilu 2014 dan 2019, memperlihatkan dukungan kuat di wilayah tertentu. Hal ini ditambah lagi dengan Papua yang wilayah barunya akan ikut pemilu tahun 2024 tanpa harus menunggu seperti kasus Kaltara pada 2013.

Koherensi Perurutan juga dapat ditemukan dalam pernyataan:

“Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 pejabat gubernur di 20 provinsi. Presiden berwenang menunjuk pejabat gubernur...” (Menit 16.33 – 17.41)

“Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014-2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun.” (Menit 35.07 – 35.18)

Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbuatan yang dilakukan secara berurutan. Jokowi yang semenjak 2021 telah menunjuk 20 PJ Gubernur yang masih menjabat hingga sekarang. Terkait bantuan sosial pun dibahas karna statistiknya dari 2014 dan 2024 sangat naik secara signifikan.

Melalui perangkat-perangkat koherensi ini, penulis menyimpulkan bahwa media dalam film *Dirty Vote* berupaya untuk membingkai isu-isu pemilu 2024 sebagai gambaran ketidakadilan yang mencerminkan praktik manipulasi politik oleh elite kekuasaan. Film ini memberi penekanan bahwa ketidaknetralan dalam pemilu, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi pemilu merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

d. Struktur Retoris

Struktur retorik dalam teks. dapat di analisa dengan memperhatikan bagaimana wartawan menekankan fakta. Mulai dari analisis melalui pemilihan kata-kata, pemakaian idiom, dan adanya gambar yang bermakna serta grafik data yang ditampilkan.

Gambar pada thumbnail atau poster film *Dirty Vote* adalah sebuah gambar yang mengilustrasikan politik sebagai permainan catur dengan bidak-bidak yang mewakili kekuatan dan strategi dalam pemilu 2024. Tanah yang retak dan suasana gelap menambah kesan bahwa proses ini penuh tipu daya dan ketidakpastian, dengan dugaan adanya manipulasi dalam pemilihan.

Kata “Dikotomi” yang disebutkan oleh Zainal merujuk pada konteks pembagian antara pendukung status quo dan pendukung perubahan. Hal ini mencerminkan pertentangan antara mereka yang ingin melanjutkan kebijakan yang ada dan mereka yang menginginkan perbaikan mendasar. Selanjutnya, ada kata “Maladministrasi” yang merujuk pada penunjukan pejabat kepala daerah oleh Mendagri Tito Karnavian melanggar putusan MK karena tidak dilakukan secara terbuka dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menilai penunjukan tersebut sebagai maladministrasi.

Kata “Birokrasi” yang merujuk pada sistem administrasi pemerintahan yang terdiri dari pegawai negeri dan lembaga pemerintah. Penyalahgunaan wewenang kepala daerah terhadap birokrasi seperti mobilisasi birokrasi, mengontrol izin lokasi kampanye, mencabut izin untuk calon tertentu tanpa alasan jelas hingga mendukung kepala desa yang tidak netral secara politik. Dengan cara ini, birokrasi dapat digunakan untuk keuntungan politik, merugikan prinsip demokrasi dan keadilan pemilu 2024.

Kepala desa juga menjadi subjek dan objek “Politisasi” karena sering menerima janji politik yang akhirnya APDESI menggelar demo untuk menuntut hal tersebut. Seperti jaminan masa jabatan dari Presiden Jokowi atau pengangkatan sekretaris desa menjadi ASN oleh SBY. Janji ini menciptakan ketergantungan politik dan mendorong kepala desa untuk terlibat dalam dinamika politik.

Kata “Populis” juga muncul dikarenakan banyaknya bantuan sosial menjelang pemilu juga peningkatan alokasi untuk bansos, BLT, dan kenaikan gaji PNS, TNI, hingga Polri. Hal ini diragukan oleh Bivitri, tindakan ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan atau hanya populisme belaka. Adapun kata lain seperti “Elektoral” yang merujuk pada hal yang berkaitan dengan pemilu dan pengambilan suara. Dalam konteks ini, bantuan sosial yang harusnya fasilitas pemerintah menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu. Terlihat dari cuplikan berita gubernur yang membagikan bansos tetapi mengajak memilih capres yang melanjutkan Jokowi.

Adapun beberapa idiom yang digunakan seperti “Anak haram konstitusi” “Palu hakim patah berkeping keping” dan “Tebang pilih” yang menggambarkan gagalnya para politisi dalam menerapkan hukum yang seharusnya. Idiom

tersebut mencerminkan MK dan KPU telah gagal untuk menegakkan hukum terkait batasan umur presiden dan wakil presiden, dilihat dari upaya yang dilakukan untuk meloloskan Gibran. Idiom “Politik gentong babi” yang merujuk pada penggunaan bansos sebagai alat politik di mana dana publik digunakan untuk proyek-proyek untuk menarik dukungan politik dari para pemilih atau konstituen tertentu.



Gambar 2. Beberapa gambar dalam film *Dirty Vote*

Beberapa gambar yang tampil pada film ini secara garis besar berisi berita, video, grafik, serta rekaman yang menunjukkan kecurangan atau ketidakwajaran para politisi dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti video keberpihakan yang PJ Gubernur Kalimantan Barat yang beredar di media sosial. Hal ini membentuk persepsi publik. Adapun data lain yang ditampilkan berupa grafik bantuan sosial yang meningkat tinggi pada tahun 2024. Hal ini dibahas narasumber bahwa proses pemilu 2024 telah di atur sedemikian rupa. Terdapat pula gambar dengan data yang berasal dari berita dan rekaman suara.

Analisis data dalam film *Dirty Vote* menyoroti bagaimana struktur dan elemen dari pernyataan, latar, struktur kalimat, pemilihan kata, hingga gambar yang bisa membentuk persepsi publik. Media ingin menekankan bahwa pemilu 2024 dipenuhi kecurangan dan manipulasi, menciptakan kesan bahwa proses pemilihan tidak transparan dan merugikan demokrasi. Dengan menggambarkan politik sebagai permainan catur, film ini menunjukkan sebuah konsep permainan dan penyalahgunaan wewenang. Citra pemilu 2024 dalam film ini disajikan sebagai proses yang mencurigakan, mengaitkan kekuatan politik dengan kepentingan tertentu dan menyoroti potensi ancaman terhadap keadilan dan keberagaman.

Hasil analisis *framing* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Dirty Vote* membingkai isu kecurangan pemilu sebagai ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia, yang digambarkan melalui strategi manipulatif dari elite politik. Menggunakan model framing Pan dan Kosicki, penelitian ini menemukan bahwa

film *Dirty Vote* menonjolkan peran strategis elite politik dalam kecurangan pemilu 2024, serta dampaknya yang dinilai menggerus prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ayomi (2021) yang menunjukkan bahwa framing media dapat membentuk dan memperkuat persepsi publik terhadap isu-isu krusial, seperti ancaman demokrasi, dengan mengarahkan fokus audiens pada sudut pandang tertentu.

Hal ini menjelaskan bagaimana media *framing* dapat mempengaruhi persepsi publik, terlihat bahwa film *Dirty Vote* tidak hanya menyajikan data yang faktual tetapi juga secara selektif mengatur informasi untuk memberikan kesan mendalam tentang pentingnya pemilu yang bersih. Strategi *framing* dalam *Dirty Vote* memperkuat pesan bahwa demokrasi Indonesia terancam oleh kepentingan politik yang menggunakan kekuasaan dengan tidak bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa media, melalui film dokumenter, memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik dengan menyajikan konteks yang memberikan perspektif tertentu.

Secara keseluruhan, *framing* yang dilakukan dalam film ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi pemilu, mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap proses pemilu, dan mendorong pemahaman akan pentingnya transparansi untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Melalui analisis struktur sintaksis, penulis menyimpulkan bahwa *framing* media dalam *Dirty Vote* menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi di Indonesia muncul akibat kecurangan sistematis yang dilakukan oleh kalangan elite politik. Berdasarkan struktur skrip, media menyoroti bahwa elite politik yang berupaya mempertahankan kekuasaan menyebabkan beragam manipulasi, mulai dari penunjukan pejabat tidak netral hingga politisasi bantuan sosial. Berdasarkan struktur tematik, media mendeskripsikan ancaman demokrasi ini dengan fokus pada penyalahgunaan kekuasaan, yang mencakup manipulasi sistem pemilu dan pengaruh politik di wilayah-wilayah strategis. Berdasarkan struktur retorik, media membingkai manipulasi pemilu sebagai tindakan yang melibatkan elite politik berpengaruh, yang digambarkan sebagai manipulatif dan oportunistik. Berdasarkan hal di atas, bisa disimpulkan bahwa film *Dirty Vote* membingkai kecurangan pemilu sebagai ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. menggambarkannya sebagai strategi sistematis yang melibatkan elite politik dan pejabat berpengaruh. Sebagai negara demokrasi, tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu bergantung pada upaya masyarakat untuk mengawasi dan menuntut pemilu yang bersih dan transparan. Dalam hal ini, media menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa film dokumenter dapat berperan penting dalam membentuk persepsi publik mengenai integritas pemilu. Diharapkan penelitian lebih lanjut dapat mengkaji pengaruh framing media ini terhadap partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz, A. K., Sumarah, N., & Ekoputro, W. (2022). ANALISIS *FRAMING* PESAN LINGKUNGAN DALAM FILM DOKUMENTER "THE STORY OF BIRTHPLACE". *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi* (E-ISSN: 2807-6818), 2(03), 39-53.
- Ali, I. F., Tolapa, M., & Nua, S. P. (2022). Analisis Semiotika Unsur-Unsur Budaya Jawa Timur Dalam Film Bumi Manusia. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 50-62.
- Arofah, K. (2015, Agustus 26). Youtube Sebagai Media Klarifikasi Dan Pernyataan Tokoh Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 112-123. [Http://Jurnal.Upnyk.Ac.Id/Index.Php/Komunikasi/Article/View/1442/1316](http://Jurnal.Upnyk.Ac.Id/Index.Php/Komunikasi/Article/View/1442/1316)
- Ayomi, H. V. (2021). ANALISIS *FRAMING* MEDIA ONLINE MENGENAI PEMBERITAAN DEKLARASI BENY WENDA. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(04), 118-125.
- BBC Indonesia. (2024, Feb 13). *Dirty Vote*: Film 'Tentang Kecurangan Pilpres' Tuai Pro-Kontra, Bagaimana Publik Harus Menyikapinya. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o>
- Butsi, F. I. (2019). Mengenal Analisis *Framing*: Tinjauan Sejarah Dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 1.
- Eriyanto. (2015). Analisis *Framing*: Konstruksi, Ideologi, Politik Media. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Hutagalung, A. S., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Produk Studi Kasus PT. Nazar Paint Cabang Cat Kiloan Sibolga. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 53-70.
- Kamaludin, K., & Dunggjo, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 01-17.
- Khairunnisa, K. (2021). Analisis *Framing* Film Dokumenter "Sexy Killers" Tentang Oligarki Dan Lingkungan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mills, J. (2005). *Framing The Global City: The Politics Of Urban Identity In Los Angeles, Chicago, And Toronto*. Routledge.
- Munif, M. A. (2023). Analisis *framing* Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam kontruksi pemberitaan wacana calon presiden 2024 di Indonesia. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 48-61.
- NisfahTurrohmah, A. (2022). Analisis Resepsi Generasi Millennial Terhadap Film Dokumenter "Sexy Killer" (Doctoral Dissertation, Upn Veteran Jawa Timur).
- Nurhasim, M. (2016). Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1), 18.

- Pratiwi, A. A. (2024). Pakar Komunikasi Politik Respon Perilisan Film “*Dirty Vote*” Jelang Pemilu 2024. Unair.Ac.Id. <https://Unair.Ac.Id/Pakar-Komunikasi-Politik-Respon-Perilisan-Film-Dirty-Vote/>
- Ramadhani, P. S. (2021). Analisis *Framing* Citra Jokowi Dalam Film Dokumenter *Sexy Killers* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rezkia, F. (2021). Analisis *Framing* “Zero Tolerance” Pada Film Indonesia: *Diversity Under Threat* Di Youtube DW (Deutsche Welle) Documentary (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Rianti, E. (2024). Soal Film *Dirty Vote*, Ini Respons Anies Baswedan. [Pemilukita.Republika](https://Pemilukita.Republika.Co.Id/Berita/S8qh0w377/Soal-Film-Dirty-Vote-Ini-Respons-Anies-Baswedan).
<https://Pemilukita.Republika.Co.Id/Berita/S8qh0w377/Soal-Film-Dirty-Vote-Ini-Respons-Anies-Baswedan>
- Satata, E. A., Korompis, D. L. C., & Dimas, M. (2024). *Framing* Kecurangan Menjelang Pemilu 2024 dalam Film “*Dirty Vote*”. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 892-902.
- Saptohutomo, A.P. & Meiliana. D. (2024). Sutradara Ungkap Alasan Rilis Film “*Dirty Vote*” Di Awal Masa Tenang Pemilu. [Kompas.Com](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/02/12/09463681/Sutradara-Ungkap-Alasan-Rilis-Film-Dirty-Vote).
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/02/12/09463681/Sutradara-Ungkap-Alasan-Rilis-Film-Dirty-Vote>.
- Syarifuddin, S. (2016). Konsep Pembentukan Keputusan dalam Akuisisi Sistem Informasi Akuntansi: Sebuah Perspektif Teori Schemata. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(4).
- Utari, M. R. E. (2020). Analisis Wacana Kritis terhadap Film Dokumenter *The Mahuzes* Pada Kanal YouTube Watchdoc Image (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Wahyuni, F. N., & Safira, F. P. (2024). Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Dalam Film Dokumenter Melalui Layanan Streaming Online Netflix. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3348-3358.
- Yulianti. (2024). Heboh Film *Dirty Vote*, Ini 7 Fakta di Baliknyaa!. [detikjabar.com](https://www.detik.com/jabar/berita/d-7188446/heboh-film-dirty-vote-ini-7-fakta-di-baliknya).
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7188446/heboh-film-dirty-vote-ini-7-fakta-di-baliknya>.